



ARSIP MENYAPA DPAD DIY

Yogyakarta Ibukota RI Jadi Memori Kolektif Bangsa

YOGYA (KR) - Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY kembali menggelar Arsip Menyapa dengan tema Yogyakarta sebagai Ibukota RI. Dibahas hal menarik dengan narasumber Imam Priyono Dwi Putranto, Anggota DPRD DIY, Rakhmat Sutopo, Kabid Pengelolaan Arsip Statis DPAD DIY dan Dr Muhammad Sulhan, Pemerhati Kearsipan.

Rakhmat Sutopo, Kabid Pengelolaan Arsip Statis DPAD DIY, mengatakan pihaknya mendaftarkan arsip ke ANRI dan saat ini diakui bahwa benar arsip-arsip Jogja sebagai ibukota Indonesia menjadi memori kolektif bangsa. Hal tersebut menurut Sutopo bisa dimanfaatkan generasi mendatang untuk mengetahui sejarah Bangsa Indonesia. "Kami tidak sendirian namun bersama Kasultanan dan Pura Pakualaman dan DPRD DIY. Ke depan setelah ke ANRI hingga disetujui, kami dari nasional ajukan ke Asia Pasifik dan dunia ke world," ungkapnya. DPAD DIY menurut Su-



KR-Istimewa

Arsip Menyapa edisi ini menghadirkan narasumber: Imam Priyono Dwi Putranto, Anggota DPRD DIY, Rakhmat Sutopo, Kabid. Pengelolaan Arsip Statis DPAD DIY dan Dr Muhammad Sulhan, Pemerhati Kearsipan.

topo saat ini terus melakukan penelitian dan pengolahan arsip yang ada terkait Jogja sebagai ibukota RI. Pihaknya juga berkolaborasi dengan masyarakat yang memiliki arsip-arsip terkait hal tersebut. "Kita terus coba kumpulkan saat ini dan akuisisi, kita selamatkan arsip-arsip yang ada. Ada yang dari keluarga pejuang dan banyak masyarakat lainnya. Ini yang harapannya bisa terus melengkapi yang sudah ada," lanjutnya.

Sementara, Imam Priyo-

no Dwi Putranto, Anggota DPRD DIY, mengatakan data-data perpindahan ibukota dari Jakarta ke Indonesia pada 4 Januari 1946 ada dalam arsip dan termuat semuanya. Dari arsip yang ada masyarakat bisa mempelajari sejarah dan nantinya ditularkan pada generasi selanjutnya.

"Bagaimana pindahnya karena faktor keamanan. Dipindahkannya ke Jogja karena bagian dari Indonesia tapi kota kerajaan. Belanda juga negara kerajaanan, dan dalam undang-undang inter-

nasional, kerajaan menghormati kerajaan. Sultan kemudian pada Oktober 1946 ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan. Bagaimana arsip nasional menceritakan semua, tentang bagaimana ibukota harus pindah ke Jogja. Bagaimana Jogja untuk bertumpu republik ini. Kita merdeka karena bangsa kita bersatu dan memerdekakan diri," ungkap Imam.

Dari arsip Imam juga menyebutkan bahwa masyarakat bisa tahu pemilu pertama kali tahun 1951 dilakukan di Yogyakarta. Pemilu seperti saat ini dengan tahapan-tahapan untuk memilih DPRD DIY. "Meski Gubernurnya dari Kasultanan, Ngarsa Dalem tapi demokratis betul. Dari arsip kita tahu semua hal itu," tandasnya.

Dr Muhammad Sulhan, Pemerhati Kearsipan, dalam dunia kearsipan figur dan tokoh sangat penting termasuk yang disampaikan dalam pemindahan ibukota ke Jogja. Dalam arsip menurut Sulhan sangat penting siapa aktor selain ruang dan waktu. (Fxb)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Oktober 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005